

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara yang penyusunannya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Dengan peran pentingnya, laporan ini berkontribusi kepada terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Kualitas laporan keuangan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat, lembaga pengawas, serta masyarakat yang berperan sebagai bagian dari kontrol sosial Sari et al, (2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa standar penting. Ini termasuk relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemudahan untuk dipahami. Tingkat relevansi laporan keuangan menentukan sejauh mana informasi yang disajikan mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan para penggunanya. Keandalan, di sisi lain, berkaitan dengan seberapa bebas laporan tersebut dari kesalahan material dan seberapa terpercaya informasi yang disajikan. Kemampuan untuk dibandingkan memungkinkan evaluasi laporan keuangan, baik antarperiode maupun antarentitas yang memiliki karakteristik serupa. Terakhir, penyajian laporan keuangan yang sistematis akan mempermudah pengguna dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada.

Penyelenggaraan laporan keuangan pemerintah melibatkan berbagai instansi, salah satu instansi yang terlibat adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN berperan penting dalam pengelolaan arus kas negara, khususnya dalam hal penerimaan dan pengeluaran anggaran. Sebagai garda terdepan dalam sistem keuangan negara, KPPN memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan dan menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pemerintah telah menerapkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sebuah inovasi teknologi yang bertujuan untuk

menyederhanakan dan menggabungkan proses pengelolaan keuangan pemerintah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan keuangan Rahman et al., (2023).

SAKTI adalah sistem aplikasi yang dirancang untuk membantu satuan kerja (Satker) dalam melakukan pencatatan keuangan negara. Aplikasi ini terhubung langsung dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) serta Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3). Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan penerimaan negara sekaligus menekan potensi terjadinya kesalahan. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses rekonsiliasi, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dalam pencatatan penerimaan negara. Rahman et al., (2023).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memegang peranan krusial dalam pengelolaan penerimaan negara. Salah satu tanggung jawab utama KPPN adalah memastikan setiap transaksi dicatat dengan akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah telah mengimplementasikan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi sistem keuangan yang lebih terintegrasi.

Penerapan SAKTI di KPPN Khusus Penerimaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sebagai unit yang fokus pada penerimaan negara, KPPN Khusus Penerimaan membutuhkan sistem yang mampu memastikan pencatatan dan pelaporan keuangan secara akurat dan real-time. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis sejauh mana penerapan SAKTI dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan di KPPN Khusus Penerimaan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin timbul dalam proses implementasinya. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul “ANALISIS PENERAPAN SAKTI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KPPN KHUSUS PENERIMAAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SAKTI dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas di KPPN Khusus penerimaan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penerapan SAKTI di KPPN Khusus Penerimaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan SAKTI terhadap kualitas laporan keuangan di KPPN Khusus Penerimaan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penerapan SAKTI di KPPN Khusus Penerimaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis untuk hal-hal berikut:

Manfaat Teoretis:

- a) Meningkatkan pengetahuan akademik tentang pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, terutama KPPN Khusus Penerimaan.
- b) Berkontribusi pada kemajuan manajemen keuangan publik dan ilmu akuntansi, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi.
- c) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui lebih dalam terkait efektivitas sistem informasi keuangan dalam tata kelola keuangan negara.

Manfaat Praktis:**1. Bagi KPPN Khusus Penerimaan**

- a) Memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan SAKTI dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- b) Mengidentifikasi kendala dalam penerapan SAKTI serta memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem.

2. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

- a) Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam pengembangan dan perbaikan sistem SAKTI guna meningkatkan tata kelola keuangan negara.
- b) Mendorong perumusan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi.

3. Bagi Peneliti

- a) Memberikan data empiris yang dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut terkait sistem informasi akuntansi di sektor pemerintahan.
- b) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada digitalisasi dan modernisasi sistem keuangan negara.